

BOOK SERIES
PERKEMBANGAN KONTEMPORER AKUNTANSI DI INDONESIA

DINAMIKA AKUNTANSI DI MASA KRISIS

VOLUME 1

Editor:

Heru Fahlevi
Ratna Mulyany
Mirna Indriani
Doddy Setiawan
Hidayatul Ihsan

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Book Series Perkembangan kontemporer Akuntansi di Indonesia

DINAMIKA AKUNTANSI DI MASA KRISIS

Volume 1

Book Series Perkembangan kontemporer Akuntansi di Indonesia

DINAMIKA AKUNTANSI DI MASA KRISIS

Volume 1

Editor:
Heru Fahlevi
Ratna Mulyany
Mirna Indriani
Doddy Setiawan
Hidayatul Ihsan

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Judul Buku:

Dinamika Akuntansi di masa krisis Volume 1

Judul Book Series:

Perkembangan kontemporer Akuntansi di Indonesia

Editor:

Heru Fahlevi
Ratna Mulyany
Mirna Indriani
Doddy Setiawan
Hidayatul Ihsan

Penata Letak:

Haris mustaqin

Perancang Sampul:

Iqbal Ridha

ISBN:

ISBN: (PDF)

Pracetak dan Produksi:

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Penerbit:

Syiah Kuala University Press
Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111,
Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh
Telp: 0651-8012221

Email:

upt.percetakan@unsyiah.ac.id
unsyiahpress@unsyiah.ac.id

Website:

<https://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id>

Cetakan Pertama, 2021

xii + 217 (15,5 cm X 23 cm)

Anggota IKAPI 018/DIA/2014

Anggota APPTI 005.101.1.09.2019

***Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit.***

KATA PENGANTAR

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku referensi ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, Januari 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN: FLEKSIBILITAS IFRS DAN DAMPAK PENERAPANNYA DI INDONESIA.....	1
1.1 FLEKSIBILITAS IFRS DI MASA PANDEMI COVID-19	1
1.1.1 PANDUAN IASB DALAM PENERAPAN IFRS 9 DI MASA PANDEMI	1
1.1.2 RELAKSASI IFRS UNTUK AKUNTANSI SEWA DI MASA PANDEMI.....	4
1.2 PANDUAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI DI BERBAGAI NEGARA	4
1.3 DAMPAK COVID-19 TERHADAP DINAMIKA STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA.....	10
1.3.1 LINI MASA PANDEMI COVID-19 TERKAIT LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA.....	11
1.3.2 RUMOR PENUNDAAN PSAK 71 KARENA COVID-19.....	12
1.3.3 PERBEDAAN PENDAPAT DSAK IAI DAN OJK MENGENAI AKUNTANSI DI MASA PANDEMI	14
1.3.4 DAMPAK PANDEMI TERHADAP PRAKTIK AKUNTANSI INDUSTRI MANUFAKTUR	17
1.4 PELAJARAN DARI PANDEMI DAN LANGKAH KE DEPAN UNTUK PELAPORAN KEUANGAN.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20
RIWAYAT HIDUP.....	21
BAB 2 OPTIMALISASI BELANJA NEGARA PENANGANAN COVID-19.....	23
2.1 INDONESIA DAN PENYEBARAN COVID-19	23
2.2 ANGGARAN BELANJA PENANGANAN COVID-19	24
2.2.1 BELANJA BIDANG KESEHATAN	25
2.2.2 BELANJA SEKTOR KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN PEMDA.....	26
2.2.3 INSENTIF USAHA.....	26
2.2.4 INSENTIF UMKM.....	27

2.2.5 PERLINDUNGAN SOSIAL.....	28
2.3 MENINGKATKAN OPTIMALISASI BELANJA, DAN MENGELOLA RISIKO	29
2.3.1 OPTIMALISASI BELANJA, DAN TINGKAT PENYERAPAN	29
2.3.2 OPTIMALISASI BELANJA, REKONSTRUKSI, REDESAIN, ANGGARAN DAN BIROKRASI	36
2.3.3 OPTIMALISASI BELANJA, KEHATI-HATIAN TETAP DIJAGA	38
2.4 OPTIMALISASI BELANJA, MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI TERANGKAT.....	41
2.4.1 BELANJA OPTIMAL, MEMBUTUHKAN REKONSOLIDASI	41
2.4.2 MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI TERANGKAT	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
RIWAYAT HIDUP	49
BAB 3 PERAN AKUNTAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA COVID-19.....	51
3.1 PRAKTIK AKUNTANSI DI UMKM	51
3.2 MANFAAT AKUNTANSI DAN PERAN AKUNTAN.....	53
3.2.1 PERAN UTAMA AKUNTAN	53
3.2.2 UMKM, PANDEMI COVID-19 DAN PERAN AKUNTANSI	55
3.3 MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19.....	59
3.4 STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI COVID-19	61
3.5 AKUNTANSI MEMITIGASI DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP	65
BAB 4 PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	67
4.1 PANDEMI COVID-19 DAN EKONOMI DAERAH	67
4.2 DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS	69
4.3 PROGRAM EKONOMI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	

PASCA PANDEMI COVID-19	71
4.3.1 JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS).....	71
4.3.2 PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)	71
4.4 ACTION PLAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH.....	73
4.4.1 DEFINISI ACTION PLAN	73
4.4.2 STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAERAH	
KABUPATEN BANYUMAS.....	74
4.4.2.1 BADAN PENDAPATAN DAERAH	75
4.4.2.2 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	76
4.5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	76
4.6 DINAS PARIWISATA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN.....	78
4.7 DINAS PERHUBUNGAN	79
4.8 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
KECIL DAN MENENGAH.....	80
4.9 DINAS PEKERJAAN UMUM.....	81
4.10 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	81
4.11 DINAS PENDIDIKAN.....	82
4.12 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIMASA	
PANDEMI	82
4.13 PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
BAB 5 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN UMKM SAAT	
PANDEMI COVID-2019.....	91
5.1 PANDEMI COVID-19 DAN USAHA MIKRO KECIL	
MENENGAH.....	91
5.2 MASALAH UMKM DI INDONESIA.....	94
5.3 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN UMKM SAAT	
PANDEMI	98
5.4 APLIKASI AKUNTANSI GRATIS SOLUSI UMKM SAAT	
COVID-19.....	103
5.5 PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
GLOSARIUM.....	113
RIWAYAT HIDUP	115

BAB 6 DAMPAK COVID-19 TERHADAP AUDITING: APLIKASI REMOTE DAN AGILE AUDITING	117
6.1 DINAMIKA PERUBAHAN DAN EVOLUSI AUDIT	117
6.2 TINJAUAN TEORITIS TERHADAP REMOTE DAN AGILE AUDIT	121
6.2.1 PENGENALAN TERHADAP REMOTE AUDIT	121
6.2.2 REMOTE AUDIT DAN KETERSEDIAAN TEKNOLOGI	122
6.2.3 AUDIT PADA PENDEKATAN REMOTE AUDIT.....	122
6.2.3.1 PERENCANAAN (PLANNING)	123
6.2.3.2 REVIEW DOKUMEN (DOCUMENT REVIEW) .	124
6.2.3.3 INVESTIGASI LAPANGAN (SITE RECONNAISSANCE)	125
6.2.3.4 WAWANCARA JARAK JAUH (REMOTE INTERVIEW)	125
6.2.3.5 PERTEMUAN PENUTUP (CLOSING MEETING)	126
6.2.4 METODOLOGI AGILE.....	127
6.2.5 SEJARAH METODOLOGI AGILE	128
6.2.6 AGILE AUDIT	129
6.3 KONDISI EXTRA ORDINARY (COVID-19) DAN OUT OF THE AUDIT.....	131
6.3.1 PENGUMPULAN BUKTI AUDIT	132
6.3.2 PERHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN	132
6.3.3 INSPEKSI ATAS ASET TETAP.....	133
6.3.4 PENGUMPULAN DOKUMEN	134
6.3.5 PENGAMATAN (OBSERVASI).....	134
6.3.6 PERMINTAAN KETERANGAN (WAWANCARA/ INTERVIEW)	135
6.4 PANDEMI COVID-19 DAN INOVASI AUDIT	135
DAFTAR PUSTAKA.....	138
RIWAYAT HIDUP	141
BAB 7 ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM) DI ERA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PADA UMPAMA COFFEE SHOP	143
7.1 PANDEMI COVID-19.....	143
7.1.1 KONDISI PANDEMI COVID-19 SECARA GLOBAL.....	143
7.1.2 KONDISI PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI DAERAH	

ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)	145
7.2 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	145
7.3 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM)	148
7.4 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YOGYAKARTA DAN PANDEMI COVID-19	151
7.5 INDIKATOR PENGUKUR KESIAPAN IMPLEMENTASI SAK-EMKM	152
7.6 PROFIL UMKM YANG DITELITI	153
7.7 KESIAPAN UMKM DALAM IMPLEMENTASI SAK-EMKM.....	154
7.7.1 GAMBARAN SINGKAT USAHA.....	154
7.7.2 KONDISI USAHA SEBELUM TERJADI PANDEMI	154
7.7.3 KONDISI USAHA SETELAH PANDEMI TERJADI.....	157
7.7.3.1 METODE PENCATATAN AKUNTANSI.....	159
7.7.3.2 KONSEP KELANGSUNGAN USAHA.....	159
7.7.3.3 KONSEP ENTITAS BISNIS	159
7.8 KESIMPULAN	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
RIWAYAT HIDUP	165

**BAB 8 DETERMINAN PENGUATAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI MASA PANDEMI**

8.1 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN PERKEMBANGANYA.....	167
8.2 PROFIL BUMDES KECAMATAN PEMULUTAN, KABUPATEN OGAN ILIR	169
8.3 METODE PENELITIAN	175
8.4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	177
8.4.1 PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PADES	178
8.4.2 PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA BUMDES TERHADAP PADES.....	180
8.4.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KOMPETENSI.....	182
8.4.4 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PADES	183
8.4.5 PENDAPATAN ASLI DESA (PADES)	185
8.4.6 DETERMINAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PADES	186

8.5 KESIMPULAN	184
DAFTAR PUSTAKA.....	185
RIWAYAT HIDUP	188
BAB 9 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI ERA PANDEMI: STUDI KASUS GAMPONG KUTA ALAM - BANDA ACEH.....	189
9.1 DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	189
9.2 DANA DESA DI PROVINSI ACEH	190
9.3 SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.....	191
9.4 PELAKSANAAN APBG DI MASA PANDEMI	195
9.5 KESIMPULAN	199
DAFTAR PUSTAKA.....	200
GLOSARIUM.....	202
RIWAYAT HIDUP	209
BAB 10 AKUNTABILITAS ANGGARAN BENCANA PADA PEMERINTAH DAERAH : Akualisasi, Partisipasi, dan Politisasi	211
10.1. ANGGARAN DAERAH DAN PANDEMI COVID-19.....	211
10.2. KEBIJAKAN ANGGARAN BENCANA DAN PANDEMI COVID-19.....	214
10.3. PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK	215
10.4. PELAPORAN KEUANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19	217
10.5. POLITIK ANGGARAN DAN PENGAWASAN LEGISLATIF.....	222
10.6. KESIMPULAN	224
REFERENSI.....	225
RIWAYAT HIDUP	229
BAB 11 PERILAKU DALAM PENGANGGARAN DAERAH DI MASA PANDEMI	231
11.1. PENGANGGARAN DAERAH DAN PANDEMI COVID-19.....	231
11.2. PERSPEKTIF GOAL SETTING THEORY DALAM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI MASA PANDEMI	234
11.3. PERILAKU PENGANGGARAN DAN PANDEMI COVID-19.....	240
11.3.1. Penentuan dan Pengukuran Kinerja Anggaran Pemerintah	

Daerah	240
11.3.2. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran	243
11.3.3. Komitmen pada Tujuan Anggaran	244
11.3.4. Perilaku Pemimpin	246
11.3.5. Penyesuaian dan Perubahan Anggaran.....	247
11.3.6. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	249
11.4. KESIMPILAN	222
RFRENSI.....	251
RIWAYAT HIDUP	258

BAB 8

DETERMINAN PENGUATAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI MASA PANDEMI

Maria Maria*, Rosy Armaini
Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang
telp. 0711 353 414, fax 0711 355918
Email: mariamardjuki@polsri.ac.id

8.1 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN PERKEMBANGANYA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Desa memiliki kesempatan luas dalam menjalankan kiprahnya menuju pembangunan ekonomi warga desa. Desa diberi hak otonomi dalam mengembangkan potensinya didasarkan pada kemampuan yang ada.

Salah satu piranti ekonomi di tingkat pedesaan adalah Badan usaha milik desa (Bumdes). Bumdes sebagai ruang ekonomi ditingkat desa diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan warganya. Dengan pertimbangan ini, Bumdes diwajibkan untuk menyampaikan maju mundur kegiatan usahanya kepada pemerintah daerah (pemda). Bumdes merupakan badan yang dibentuk dengan pertimbangan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menganut asas mandiri.

Pendirian dan pengelolaan Bumdes merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi masyarakat desa yang dijalankan dengan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Bumdes dilaksanakan dan dikelola melalui keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan Bumdes tersebut.

Jumlah Bumdes di Indonesia terus berkembang sejak tahun 2015-

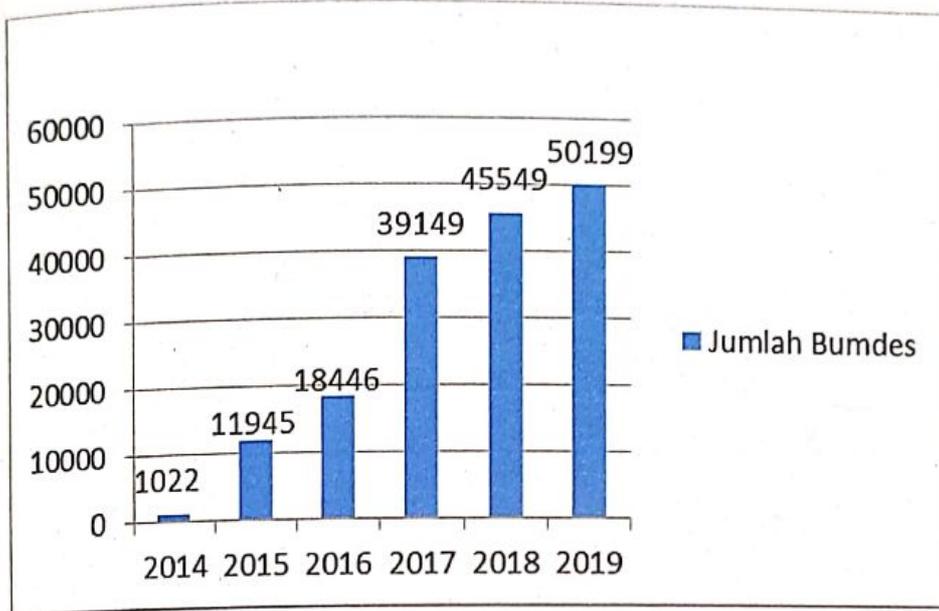
2019 (Prastowo, 2020). Pada tahun 2019 tercatat jumlah Bumdes telah mencapai 50.199 unit. Di Sumatera Selatan (Tim Orator, 2019), sebanyak 1.064 Bumdes tergolong klasifikasi dasar, 1.244 kategori tumbuh dan 53 Bumdes dalam kategori berkembang. Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, tepatnya di kecamatan Pemulutan terdapat 20 Bumdes yang perlu mendapat perhatian pertumbuhannya di masa pandemi ini. Bumdes di kecamatan ini mulai dibentuk tahun 2017 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Masa pandemi menjadi satu tantangan pemerintah desa dalam mempertahankan ekonomi masyarakat, menggali sumber daya yang bernilai jual bagi masyarakat pedesaan. Tantangan ini secara mendalam memberikan pemikiran untuk menentukan strategi yang dapat dipilih Bumdes dalam memenangkan kompetisi tetap eksis atau bahkan gulung tikar. Keberhasilan desa dalam mengelola Bumdes tidak terlepas dari sumber daya alam yang dimiliki, modal pendanaan, dukungan masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dan kepemimpinannya.

Di masa pandemi COVID-19, omset Bumdes di kecamatan Pemulutan pada umumnya menurun semua. Hal ini juga tidak terlepas dari jenis usaha yang dijalankan, antara lain: usaha catering, sewa tenda, usaha tenda dan pelaminan. Seperti diketahui, usaha-usaha ini tidak terlepas dari kerumunan orang/keramaian yang pada gilirannya akan berakibat turunnya permintaan pangsa pasar di masa pandemi. Kondisi ini akhirnya bermuara pula pada menurunnya PADes.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) menyebutkan bahwa Bumdes di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jumlah Bumdes meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 Bumdes hanya terdapat 1.022 unit, tahun 2015 jumlah Bumdes mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 11.945 unit. Tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 18.446 unit. Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah Bumdes menjadi 39.149 unit dan tahun 2018 jumlah Bumdes tercatat sebanyak 45.549 unit serta di tahun 2019 jumlah Bumdes telah mencapai 50.199 unit. Dengan Meningkatnya jumlah Bumdes setiap tahun, diharapkan Bumdes dapat menjadi contoh yang baik sesuai dengan jenis-jenis usaha yang dijalankan dan juga dapat dijadikan badan usaha yang bermanfaat baik bagi pemerintah desa maupun masyarakatnya.

Selanjutnya, perkembangan Bumdes di Indonesia dari kurun waktu 2014-2019 sebagaimana ditampilkan pada gambar 8.1.



Gambar 8.1 Jumlah Bumdes di Indonesia Tahun 2014-2019

Sumber : Kemendes PDTT, 2020

8.2 PROFIL BUMDES KECAMATAN PEMULUTAN, KABUPATEN OGAN ILIR

Pemulutan, salah satu nama kecamatan yang berada pada Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Kecamatan ini telah mendirikan Bumdes sejak diberlakukannya peraturan daerah (perda) Kabupaten Ogan Ilir No. 2 tahun 2017 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Bumdes. Dengan adanya perda tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman, kejelasan, kepastian dan pengelolaan terhadap Bumdes. Setiap kecamatan diharuskan mendirikan Bumdes agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal perekonomian, pembangunan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desanya. Berdasarkan peraturan desa (perdes)/ perdes bersama nomor 01 sampai dengan 09 tahun 2017 jumlah Bumdes di kecamatan Pemulutan berjumlah 25 buah, namun yang aktif hingga saat ini berjumlah 20 Bumdes. Tabel 11 berikut ini menampilkan daftar Bumdes dengan status aktif di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2020.

Tabel 11. Daftar Bumdes di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

No.	Nama Desa	Nama Bumdes	Tahun Berdiri	Status
1.	Palu	Jaya Bersama	2017	Aktif
2.	Sungai Rasau	Sungai Rasau Sejahtera	2017	Aktif
3.	Rawa Jaya	Raja	2017	Aktif
4.	Teluk Kecapi	Harapan Jaya	2017	Aktif
5.	Pelabuhan Dalam	Karya Muda	2017	Aktif
6.	Sembadak	Sembadak Jaya	2017	Aktif
7.	Kedukan Bujang	Usaha Bersama	2017	Aktif
8.	Pemulutan Ilir	Sampoerna	2017	Aktif
9.	Pemulutan Ulu	Amanah	2017	Aktif
10.	Pegayut	Sepakat Jaya	2017	Aktif
11.	Pipa Putih	Bunga Dahlia	2017	Aktif
12.	Simpang Pel Dalam	Optimis	2017	Aktif
13.	Sungai Buaya	Mitra Sejahtera	2017	Aktif
14.	Aurstanding	Sehati	2017	Aktif
15.	Muara Dua	Maju Bersama	2017	Aktif
16.	Tanjung Pasir	Maju Bersama	2017	Aktif
17.	Mekar Jaya	Harapan Mulia	2017	Aktif
18.	Ibul Besar II	Usaha Bersama	2017	Aktif
19.	Ibul Besar III	Praka Jaya	2017	Aktif
20.	Muara Baru	Usaha Bersama	2017	Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020

Berdasarkan tabel 1, Kecamatan Pemulutan merupakan Kecamatan yang sudah melakukan pendirian Bumdes didasarkan bahwa satu desa harus memiliki satu Bumdes. Kementerian Desa, PDTT menyebutkan jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dijalankan oleh Bumdes adalah: a) usaha sosial (pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna); b) usaha penyewaan (penyewaan alat transportasi, peralatan pesta, penyewaan gedung, penyewaan ruko/kios, penyewaan tanah milik desa, dll.); c) usaha perantara (jasa pelayanan kepada warga desa dan Bumdes sebagai lembaga pemasaran produk pertanian, kerajinan, dll.); d) usaha berproduksi dan/atau berdagang; e) usaha bisnis keuangan (usaha simpan pinjam, bank desa, dll.); dan f) usaha bersama seperti desa wisata, pengembangan kerajinan khas desa berskala menengah, dll.).

Sesuai dengan pernyataan Kementerian Desa, PDTT maka kecamatan Pemulutan telah mendirikan Bumdes dengan berbagai jenis usaha yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya usaha Bumdes di Kecamatan Pemulutan tersebut ditampilkan pada tabel 12.

Tabel 12. Bumdes dan Jenis Usahanya pada Kecamatan Pemulutan

No.	Nama Bumdes	Jenis Usaha
1.	Jaya Bersama	Perdagangan (jual pasir)
2.	Sungai Rasau Sejahtera	Simpan pinjam
3.	Raja	Jasa penyewaan (tenda)
4.	Harapan Jaya	Perdagangan (agen gas)
5.	Karya Muda	Jasa angkut pasir
6.	Sembadak Jaya	Jasa las (bengkel las)
7.	Usaha Bersama	Jasa penyeberangan (transportasi sungai)
8.	Sampoerna	Jasa penyewaan (tenda dll.)
9.	Amanah	Perdagangan (agen elpiji)
10.	Sepakat Jaya	Simpan pinjam
11.	Bunga Dahlia	Jasa penyewaan
12.	Optimis	Jasa las (bengkel las)
13.	Mitra Sejahtera	Penyediaan air minum (galon isi ulang)
14.	Sehati	Perdagangan (agen elpiji)
15.	Maju Bersama	Jasa penyewaan (catering)
16.	Maju Bersama	Pengelolaan (tenun songket)
17.	Harapan Mulia	Jasa penyewaan (tenda)
18.	Usaha Bersama	Jasa penyewaan (pelaminan)
19.	Praka Jaya	Jasa penyewaan (tenda)
20.	Maju Bersama	Jasa penyewaan (tenda)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020

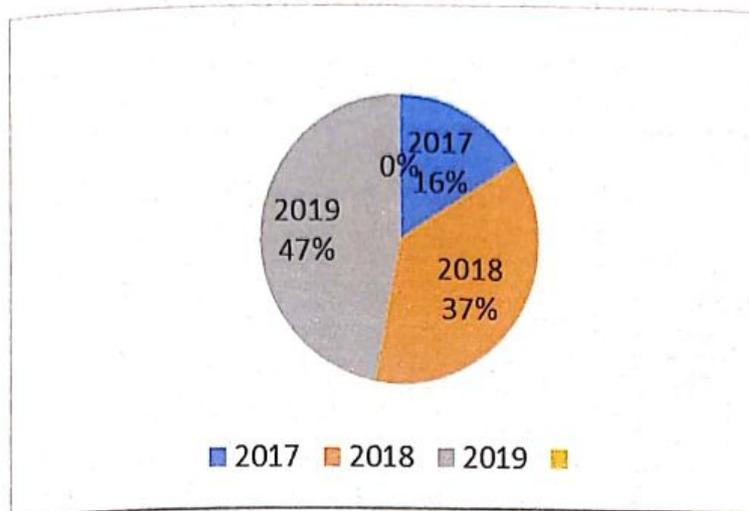
Berdasarkan tabel 12, jenis usaha Bumdes di Kecamatan Pemulutan beragam: penyewaan tenda, simpan pinjam, sewa alat catering, perikanan, agen tabung gas dan lain sebagainya. Keberadaan Bumdes memberikan kontribusi positif terhadap PAdes yang mana setiap tahunnya hasil usaha Bumdes tersebut mendapatkan laba bersih atau keuntungan dan nantinya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Laba bersih Bumdes yang dikontribusikan bagi PAdes pada masing-masing desa tahun 2017-2019 ditunjukkan pada tabel 13.

Tabel 13. Kontribusi Laba Bersih Bumdes Terhadap PADes di Desa-desa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019 (dalam rupiah)

No.	Nama Desa	Laba bersih		
		2017	2018	2019
1.	Palu	2.000.000	-	3.000.000
2.	Sungai Rasau	-	10.000.000	12.050.000
3.	Rawa Jaya	-	-	1.870.000
4.	Teluk Kecapi	-	2.000.000	5.640.000
5.	Pelabuhan Dalam	1.000.000	1.500.000	2.050.000
6.	Sembadak	-	300.000	-
7.	Kedukan Bujang	7.000.000	13.000.000	14.000.000
8.	Pemulutan Ilir	-	12.000.000	15.000.000
9.	Pemulutan Ulu	5.000.000	7.000.000	8.500.000
10.	Pegayut	-	5.000.000	-
11.	Pipa Putih	800,000	1.050.000	-
12.	Simpang PeL. Dalam	500.000	2.000.000	3.000.000
13.	Sungai Buaya	650,000	-	-
14.	Aurstanding	-	-	-
15.	Muara Dua	2.000.000	3.000.000	5.000.000
16.	Tanjung Pasir	-	-	-
17.	Mekar Jaya	700.000	2.500.000	4.120.000
18.	Ibul Besar II	300,000	1.000.000	-
19.	Ibuk Besar III	780,000	-	1.000.000
20.	Muara Baru	-	1.000.000	2.000.000
	JUMLAH	25.702.530	61.350.000	77.230.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020.

Bila dilihat secara keseluruhan, kontribusi Laba Bersih 20 Bumdes terhadap PADes di kecamatan Pemulutan tahun 2017-2019 seperti tampilan gambar 2.



Gambar 8.2 Laba Bersih Bumdes Terhadap Pendapatan Asli Desa Tahun 2017-2019 (dalam %)

Gambar 8.2 menunjukkan bahwa kontribusi laba bersih Bumdes-Bumdes terhadap PADES di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Peningkatan laba bersih dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar Rp35.647.470 atau sebesar 21% yaitu dari Rp25.702.530 menjadi Rp61.350.000 sedangkan laba bersih tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp15.880.000 atau sebesar 10%, dari Rp61.350.000 menjadi Rp77.230.000. Meskipun laba bersih Bumdes tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya tidak berarti bahwa hal ini sejalan dengan kondisi kesehatan keuangan Bumdes.

Untuk melihat secara rinci PADES pada masing-masing desa (20 desa) yang berasal dari hasil usaha Bumdes di kecamatan Pemulutan pada tahun 2017-2019, tabel berikut ini (tabel 14), menunjukkan jumlah PADES selama tiga tahun tersebut.

Tabel 14. Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Pemulutan

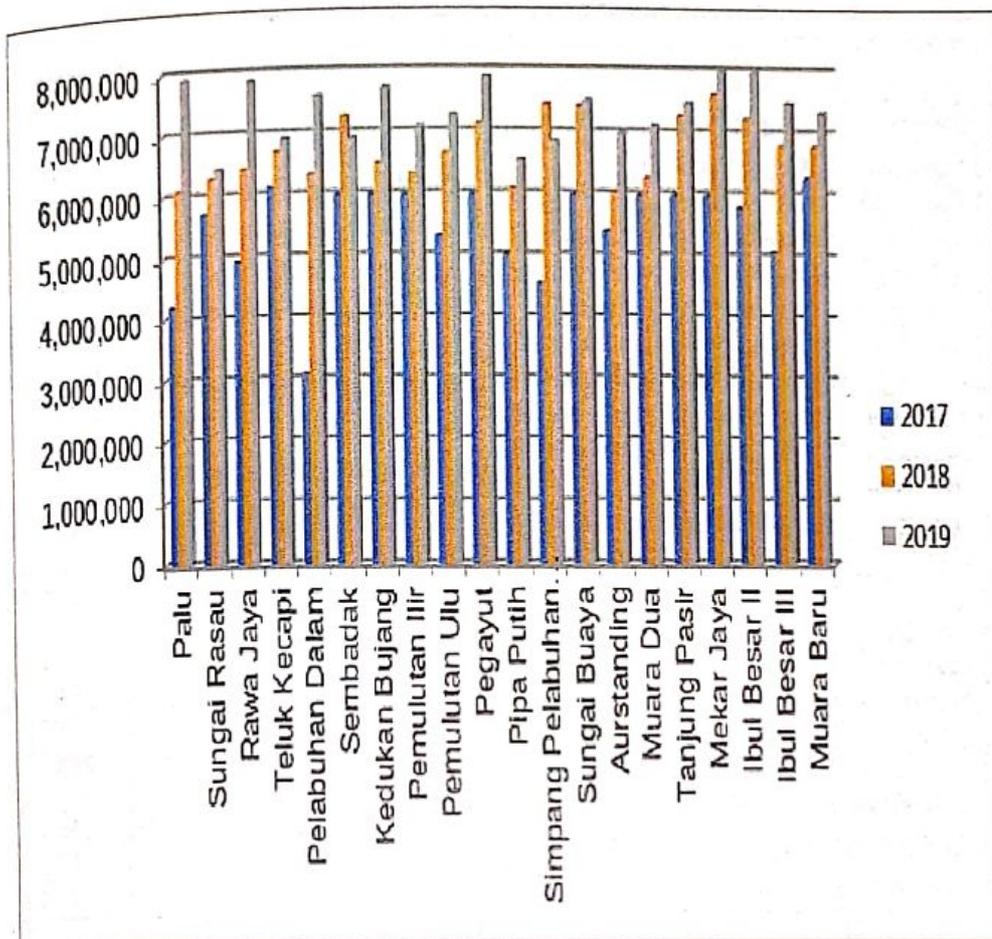
No.	Desa	Jumlah PADES (Rupiah)		
		2017	2018	2019
1	Palu	4.222.000	6.110.800	7.920.000
2	Sungai Rasau	5.731.000	6.292.500	6.450.000
3	Rawa Jaya	4.924.000	6.442.100	7.870.777
4	Teluk Kecapi	6.140.210	6.725.100	6.929.000
5	Pelabuhan Dalam	3.109.000	6.350.800	7.610.100

6	Sembadak	6.000.000	7.270.300	6.918.500
7	Kedukan Bujang	6.000.000	6.510.000	7.735.500
8	Pemulutan Ilir	6.000.000	6.337.200	7.100.000
9	Pemulutan Ulu	5.340.000	6.679.250	7.290.000
10	Pegayut	6.000.000	7.150.500	7.910.000
11	Pipa Putih	5.021.000	6.100.350	6.569.250
12	Simpang Pel. Dalam	4.568.000	7.460.400	6.875.200
13	Sungai Buaya	6.005.000	7.432.000	7.521.500
14	Aurstanding	5.419.000	6.050.000	7.000.000
15	Muara Dua	6.000.000	6.286.500	7.125.000
16	Tanjung Pasir	6.000.000	7.289.000	7.487.096
17	Mekar Jaya	6.000.000	7.638.200	8.000.000
18	Ibul Besar II	5.810.800	7.250.000	8.000.000
19	Ibul Besar III	5.100.100	6.800.000	7.500.000
20	Muara Baru	6.286.900	6.800.000	7.340.500

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kecamatan Pemulutan

Berdasarkan tabel 14, jumlah PADes melalui hasil usaha Bumdes di setiap desa pada kecamatan Pemulutan memiliki kontribusi cukup beragam. Desa/Bumdes yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PADes pada tahun 2019 adalah desa Mekar Jaya dan desa Ibul II senilai Rp8.000.000 sedangkan kontribusi Bumdes terhadap PADes terkecil dimiliki desa Sungai Rasau yaitu senilai Rp6.450.000. Disisi lain, di kecamatan Pemulutan terdapat juga penyertaan modal Bumdes pada tahun 2017 senilai Rp2.677.500.000, tahun 2018 senilai Rp1.011.085.200, dan tahun 2019 senilai Rp525.000.000.

Selanjutnya, grafik PADes masing-masing desa untuk tahun 2017-2019 sebagaimana disebutkan pada tabel 14 dapat dilihat pada gambar 8.3.



Gambar 8.3 Grafik PADes dari Kontribusi Bumdes Aktif Di Kecamatan Pemulutan Tahun 2017-2019

8.3 METODE PENELITIAN

Metoda yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif verifikatif yang mengkaji hubungan kausalitas secara terstruktur, faktual, dan akurat hubungan antar variabel dependen terhadap variabel independen dengan uji statistik. Variabel yang digunakan terdiri atas tiga variabel dependen sebagai determinan penguatan Bumdes, yaitu: partisipasi masyarakat (x_1), kompetensi aparatur/pengelola Bumdes (x_2), dan gaya kepemimpinan (x_3), serta Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai variabel independen (y). Tabel 15 menunjukkan operasionalisasi variabel yang digunakan.

Tabel 15. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Item Pert.
Partisipasi Masyarakat (X₁) Partisipasi Masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat selama proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka (Moh. Mulyadi, 2019)	1. Keterlibatan dalam mengambil keputusan	1,2
	2. Memberikan ide/pendapat	3,4
	3. Memberikan tanggapan dan gagasan digitalisasi pemasaran	5
	4. Mengawasi program Bumdes	6
	5. Melakukan penilaian aktivitas Bumdes.	7
Kompetensi Pengelola Bumdes (X₂) Kompetensi sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai kemampuan atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya (Sedarmayanti, 2018)	1. Pendidikan	1,2
	2. Pengalaman	3,4
	3. Terampil dalam pekerjaan	5,6
	4. Ketrampilan khusus	7,8,9
	5. Minat	10
	6. Sikap	11
	7. Apresiasi pekerjaan	12
Gaya Kepemimpinan (X₃) Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka memengaruhi kinerja bawahannya guna mencapai sasaran organisasi (V. Rivai & D.Mulyadi, 2011)	1. Pemimpin memiliki jiwa demokratis	1-5
	2. Pemimpin memiliki visi dan tujuan organisasi yang jelas	6,7,8
	3. Pemimpin memiliki arahan yang berskala	9,10
	4. Pemimpin memberikan motivasi kepada karyawan	11,2
	5. Pemimpin memiliki kemampuan manajerial yang baik	13,14,15
	6. Pemimpin mengevaluasi setiap tugas yang diberikan	16,17,18

Variabel	Indikator	Item Pert.
Pendapatan Asli Desa (Y) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (UU No 6/2014, Permendagri No.20 Tahun 2018)	1. Kontribusi dari Bumdes	1,2,3,4
	2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5,6
	3. Sesuai dengan potensi desa	7,8,9

Sumber: Beberapa Referensi Terkait, 2011-2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, merujuk pada (Sugiyono, 2017) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), penyebaran kuesioner serta observasi (pengamatan). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner serta studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yaitu komisariss, direktur, ketua, sekretaris, bendahara Bumdes, di desa-desa yang disurvei dan juga ditujukan kepada kepala desa sebagai unsur pemerintahan desa.

Hipotesis penelitian perlu dibuktikan/diuji untuk melihat determinan penguatan Bumdes (partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes, dan gaya kepemimpinan) baik secara parsial (H_1 , H_2 , dan H_3) maupun secara bersama-sama (H_4) terhadap pendapatan asli desa. Dengan demikian hipotesis penelitian ini ada empat. Oleh karena itu dilakukan uji t dan uji F untuk membuktikan keempat hipotesis tersebut.

8.4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi pada 20 Bumdes di kecamatan Pemulutan menunjukkan hasil dari karakteristik pendidikan formal responden (komisariss, direktur, ketua, sekretaris, bendahara) sebagaimana ditampilkan pada tabel 16.

Tabel 16 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Urut.	Tingkat Pendidikan	Total	%
1.	Sekolah Dasar	1	1,25
2.	SLTP	7	8,75
3.	SLTA	56	70
4.	D3	7	8,75
5.	S1	9	11,25
	Total	80	100

Sumber: Jawaban responden, 2020

Karakteristik berdasarkan lama bekerja responden dalam mengelola Bumdes pada masing-masing desa di Kecamatan Pemulutan, menunjukkan bahwa responden yang bekerja dalam jangka waktu 1-3 tahun sebanyak 80 orang. Sebaran responden berdasarkan lama bekerja ditunjukkan pada tabel 17.

Tabel 17. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama bekerja	Total	%
1	1-3 tahun	80	100
Total		80	100

Sumber: Jawaban responden terhadap kuesioner (2020)

Pengujian kualitas data yang dilakukan (uji validitas dan reabilitas), menunjukkan hasil uji item per variabel valid dan realibel. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengolahan data menghasilkan suatu model persamaan sebagai berikut:

$$PADes = 16,140 + 0,122PM + 0,018KPB + 0,242GK$$

Keterangan:

PADes : pendapatan asli desa

PM : partisipasi masyarakat

KPB : kompetensi pengelola Bumdes

GK : gaya kepemimpinan

Model persamaan regresi berganda tersebut di atas telah memenuhi uji asumsi klasik. Model ini, mengisyaratkan partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli desa.

8.4.1 PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PADES

Partisipasi, suatu bentuk keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong pada pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Dwiningrum, 2011). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi, 2005) dan masyarakat yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui organisasi (Zamroni, 2011). (Cohen and Uphoff, 1977); (Mulyadi, 2019) menegaskan, keikutsertaan masyarakat sebagai sumbangsih kesukarelaan mereka dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan program yang dinikmati manfaatnya serta dilibatkan dalam

evaluasi program untuk tingkat kesejahteraan.

Partisipasi masyarakat desa merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 6/2014, dapat dilakukan melalui perencanaan dan pembangunan desa, mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, merencanakan pembangunan desa, menyusun kebijakan desa, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.

Lebih lanjut, pada pasal 127 disebutkan, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Merujuk pada pasal 127 di atas, partisipasi masyarakat desa, mengindikasikan bahwa keikutsertaan masyarakat akan berkontribusi dalam pengembangan badan usaha serta mendorong peningkatan PADes. Semakin tinggi tingkat keberhasilan yang didapat maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola Bumdes. Ini berarti bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat maka PADes melalui pengelolaan Bumdes juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika partisipasi masyarakat mengalami penurunan maka PADes melalui pengelolaan Bumdes juga akan menurun.

Hasil studi yang dilakukan di Bumdes-Bumdes kecamatan Pemulutan (Kabupaten Ogan Ilir) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di era pandemi COVID-19 ini tidak berkontribusi terhadap keberhasilan Bumdes dalam meningkatkan PADes. Penelitian ini tentunya berbeda dalam kondisi normal sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Pratiwi,

Sujana & Haris, 2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan program kerja Bumdes.

Dari 20 Bumdes yang diteliti, Bumdes mengalami penurunan omset bahkan partisipasi masyarakat berdampak negatif dalam kemajuan Bumdes. Partisipasi masyarakat semestinya diimbangi dengan era digital untuk mengurangi kerumunan dalam beraktivitas. Namun, di sisi lain jenis usaha Bumdes pun masih melayani kebutuhan lokal sehingga peran teknologi belum dirasakan hal yang urgen.

Hasil sintesisasi atas jawaban responden sejumlah 80 orang, menunjukkan dalam situasi pandemi, masyarakat desa kurang terlibat dalam merencanakan penguatan Bumdes. Sebagaimana adanya, masyarakat tidak aktif dalam memberikan ide/pendapat dalam pertemuan Bumdes. Kondisi ini semestinya diimbangi dengan keterlibatan masyarakat desa dalam memberikan gagasan pentingnya digitalisasi misalnya tentang pemasaran produk Bumdes.

Studi ini menggunakan lima indikator: keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan ide/pendapat, memberikan tanggapan dan gagasan pentingnya digitalisasi pemasaran, mengawasi program Bumdes, melakukan penilaian aktivitas Bumdes.

Hasil uji-t partisipasi masyarakat terhadap PADes pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap PADes. Berdasarkan temuan uji hipotesis, bahwa nilai t_{hitung} partisipasi masyarakat senilai 1,117 dengan signifikansi 0,268 akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,665. Oleh karena nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$, maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap PADes.

8.4.2 PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA BUMDES TERHADAP PADES

David McClelland (1973), memperkenalkan teori kompetensi melalui hasil karyanya yang berjudul "Testing for competence rather than for intelligence". Tulisan tersebut mengisyaratkan terdapat karakteristik dasar yang lebih penting dalam menilai kinerja yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari tiga unsur: pengetahuan, keterampilan dan kepribadian (Soleman dan Latuconsina, 2019). Kompetensi dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasinya.

Kompetensi, segala sesuatu sehubungan dengan pengetahuan, keahlian, kemampuan serta beberapa karakteristik lainnya yang

mengakibatkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan organisasi berdasarkan jenjang jabatan yang diembannya (Sedarmayanti, 2018).

(June dan Mahmood, 2011) menegaskan, "Competency was described as underlying characteristic of an individual, which are causally (change in one variable because change in another) related to effective job performance". Karakteristik individu merupakan kompetensi seseorang yang dihubungkan dengan kinerja yang efektif. Dengan kata lain, kompetensi yaitu setiap karakteristik yang dimiliki seseorang; kemampuan bekerja, kreativitas, moral dan sebagainya yang memberikan kontribusi bagi suatu organisasi. Kompetensi seseorang tercermin melalui kemampuan mengakses perkembangan teknologi seperti komputerisasi, kemampuan mengantisipasi adanya perubahan.

Kompetensi dapat ditinjau dari berbagai aspek. (Spencer & Spencer, 1993); (Sudarmanto, 2014) menyebutkan setidaknya ada lima karakteristik kompetensi, yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, ketrampilan. Studi/penelitian di Bumdes-Bumdes kecamatan Pemulutan, kompetensi pengelola Bumdes menggunakan tujuh indikator meliputi: pendidikan, pengalaman, ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaan, ketrampilan khusus, minat, sikap dan apresiasi terhadap pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata jawaban responden menyatakan latar belakang pendidikan sangat penting dalam mengelola Bumdes, namun latar belakang pendidikan yang berbeda dengan pekerjaan tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diembankan. Artinya, motif seseorang mendorong perilaku terhadap tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Bumdes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pengelola/aparatur Bumdes yang kompeten. Kompetensi aparatur Bumdes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Sesuai hasil studi terhadap Bumdes diperoleh fakta, keterlibatan pengelola Bumdes sangat terbuka, namun kendala yang ada, masih rendahnya tingkat sumber daya pengelola.

Penguatan berupa pelatihan yang mendukung program Bumdes perlu dilakukan. Keberadaan Bumdes masih membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam meningkatkan kompetensi sumberdaya pengelola. Berdasarkan hasil di lapangan, bahwa penyebaran program Bumdes di kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir lebih fokus pada aktivitas

penyewaan seperti sewa tenda jika dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal dalam meningkatkan PADes apalagi pada saat pandemi ini. Masih rendahnya kompetensi pengelola Bumdes dalam membangun jiwa kewirausahaan dan perlu adanya pelatihan peningkatan SDM guna meningkatkan tata kelola Bumdes secara terus-menerus.

8.4.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KOMPETENSI

(Gordon, 1988); (Sutrisno, 2011) menyebutkan setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kompetensi seseorang, yaitu: pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat. Studi yang dilakukan untuk mengukur kompetensi aparatur/pengelola Bumdes merujuk pada Sedamaryanti 2018 meliputi: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Sehubungan dengan pengelolaan Bumdes, pengetahuan diukur berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang menjabat tugas yang diembannya. Berdasar tabel 6 dan tabel 7, aparatur Bumdes mayoritas berada pada tingkat pendidikan SLTA dan pengalaman semuanya sama selama 3 tahun (sejak berdiri 2017) dengan sebaran: jabatan komisaris (18 orang), direktur (21 orang), ketua (1 orang), sekretaris (20 orang) dan bendahara (20 orang).

b. Keterampilan (*Skill*)

Seseorang menjalankan tugasnya bertanggung jawab secara fisik dan mental. Bila dihubungkan dengan aparatur Bumdes di kecamatan Pemulutan, fakta menunjukkan masih kurangnya keterampilan khusus yang dimiliki terutama dalam hal penggalangan dana dan metode kerja yang efektif untuk bertahan dalam suasana pandemi ini.

c. Sikap (*Attitude*)

Sikap, tingkat kepekaan seseorang terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Contohnya, reaksi terhadap keterlambatan pembayaran gaji, pengurangan tenaga kerja, dampak kehilangan pekerjaan, anggota tidak dapat membayar angsuran pinjaman, kekurangan modal, biaya operasional membengkak. Hal-hal ini dialami semua Bumdes di kecamatan Pemulutan saat pandemi ini.

Hasil studi terhadap Bumdes-Bumdes menunjukkan temuan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kompetensi aparatur/pengelola Bumdes tidak berkontribusi pada pengelolaan keuangan Bumdes.

Kondisi ini menunjukkan masa pandemi COVID-19 telah melumpuhkan atau berdampak pada sektor perekonomian desa. Keberartian kompetensi pengelola Bumdes tidak dapat didayagunakan dalam kondisi lingkungan yang tidak kondusif, semua harus menjaga jarak sosial, interaksi sesama. Dalam hal ini perlu adanya kompetensi komputerisasi (digitalisasi) dengan dukungan sarana prasarana desa setempat untuk memasarkan produk Bumdes sehingga diharapkan Bumdes tersebut tidak gulung tikar.

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,181 < 1,665$) dengan nilai signifikan sebesar $0,857 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa kompetensi pengelola Bumdes (X_2) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli desa (Y). Dengan demikian hipotesis 2 (H_2) ditolak.

8.4.4 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PADES

Kepemimpinan, berkontribusi dalam sebuah organisasi terhadap berhasil tidaknya suatu tujuan. Seorang pemimpin bertanggung jawab secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja yang dipimpinya. Kepemimpinan, suatu proses memengaruhi oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya (Yamin dan Maisah, 2010), seni memotivasi dan memengaruhi sekelompok orang untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki cara pandang dalam mengorganisir, mengarahkan, mengawasi bawahan agar semua bagian pekerjaan terkoordinir dengan baik. Dalam hal ini gaya/style memimpin dibutuhkan.

Gaya kepemimpinan dibutuhkan agar sasaran organisasi tercapai (Alimudin dan Sukoco, 2017), fokus pada apa yang dilakukan dan berperilaku (Northouse, 2013), sebagai norma perilaku (Thoha, 2010), perilaku dan strategi (Rivai dan Mulyadi, 2011), sebagai hasil komunikasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan sebagai penguatan bagi Bumdes di kecamatan Ogan Ilir ternyata berkontribusi terhadap keberhasilan Bumdes dalam meningkatkan PADes di masa pandemi.

Hasil studi menunjukkan seorang pimpinan yang berhasil dalam mengayomi bawahan untuk tetap bertahan dalam suasana yang sulit, pemimpin yang memiliki jiwa demokratis, memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk mempertahankan usaha yang dijalani. Pengelola Bumdes, selalu memberikan arahan, motivasi kepada para pegawai bumdes untuk bertahan dalam meneruskan usaha bumdes dengan segala keterbatasan

yang ada. Setiap keputusan yang diambil, melibatkan para pengelola Bumdes dan menerima masukan/saran dari bawahan dan pemilik Bumdes. Sifat dan sikap berperilaku pimpinan mampu memberikan suasana kondusif bawahannya.

Gaya kepemimpinan yang dimiliki Bumdes-Bumdes di kecamatan Pemulutan menunjukkan kepemimpinan demokratis, memperlakukan bawahan sepenuhnya dengan bijak, mampu melakukan pekerjaan sendiri dan saling menguatkan. Ditengah kondisi pandemi ini, memang Bumdes yang melibatkan pangsa pasar khalayak ramai jelas terganggu aktivitasnya. Namun, hal ini tidak menjadikan Bumdes tersebut gulung tikar. Dengan segala keterbatasan yang ada, usaha Bumdes masih tetap eksis walaupun omset menurun. Untuk usaha Bumdes yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan gas dan galon isi ulang serta penjualan tanah pasir masih tetap eksis seperti kondisi sebelum pandemi.

Jenis gaya kepemimpinan merujuk pada (Northouse, 2013):

a. Gaya Kepemimpinan otoriter

Gaya kepemimpinan ini membuat pemimpin otoriter melihat bawahan memerlukan arahan, maka pemimpin otoriter perlu mengontrol bawahan tentang apa yang mereka lakukan.

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa pemimpin demokratis memperlakukan bawahan sepenuhnya dengan adil dan mampu melakukan pekerjaannya sendiri sehingga mereka memberikan nasehat dan dukungan.

c. Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire

Gaya kepemimpinan ini membiarkan bawahan untuk berfungsi dengan sendirinya, tanpa memberikan arahan atau dorongan.

House dalam Robbins (2015) menyebutkan ada empat gaya kepemimpinan, yaitu: Kepemimpinan direktif, Kepemimpinan suportif, Kepemimpinan partisipatif dan Kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Hasil penelitian (Furqon & Qudbi, 2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja masyarakat Bumdes. (Nisa, 2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi Bumdes. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan Bumdes. Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,242 > 1,665$) dengan nilai

signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dinyatakan gaya kepemimpinan (X_3) memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli desa (Y). Dengan demikian hipotesis 3 (H_3) diterima, artinya gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli desa. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap PADes di kecamatan Pemulutan sebesar 19,18% dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,438.

8.4.5 PENDAPATAN ASLI DESA (PADES)

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 (1) butir a menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Demikian juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 12, ayat 1. Lebih lanjut pada ayat 2 disebutkan hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil Bumdes.

Masing-masing desa memiliki beberapa potensi yang dijadikan sebagai sumber PADes dapat berupa pasar desa, wisata desa, maupun yang lainnya sesuai yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini, warga desa dapat membentuk usaha yang dikelola secara mandiri berupa Bumdes.

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam mengelola keuangannya. Desa berperan strategis dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya (Atmadja, Saputra dan Koswara, 2018). Sumber pendapatan desa yang berasal dari PADes merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan (Saputra *et al.*, 2019).

PADes meliputi semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan. PADes merupakan pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

Pengelolaan PADes yang dilakukan oleh desa-desa di kecamatan Pemulutan dioptimalkan dengan bekerja sama pada berbagai pihak yang dipisahkan pengelolaannya dengan Bumdes. Pengelolaan ini telah menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan

dan akuntabel. Pengelolaan setidaknya harus diketahui oleh semua masyarakat desa.

Pengelolaan Bumdes membutuhkan campur tangan pemerintah desa dan seharusnya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan. Seluruh aktivitas berakhirnya penyelenggaraan program desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Permendagri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi permendagri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

8.4.6 DETERMINAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PADES

Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa harus menganut prinsip transparan. Oleh karena itu, diperlukan desain informasi tentang kinerja Bumdes. Segala aktivitas berkaitan dengan Bumdes perlu diketahui keberadaannya oleh warga desa, mengingat kepentingan masyarakat desa sehingga sebagai lembaga ekonomi desa Bumdes akan memperoleh dukungan dari banyak pihak. Bumdes sebagai mata rantai penghasil PADes. Sebagaimana konsep awal dibentuknya Bumdes, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi desa. Keberadaan Bumdes telah diatur sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 213 ayat 1 yang aplikasinya diwujudkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang didalamnya mencakup Bumdes. Dalam pengelolaan Bumdes pada prinsipnya mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset desa (Saputra et al., 2019) dan memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Bumdes bukan organisasi sosial tetapi berorientasi pada profit. Pengelolaan Bumdes mengandung prinsip transparan, jujur, melibatkan warga desa dan menjunjung nilai keadilan.

Keradaan Bumdes di kecamatan Pemulutan yang tersebar di setiap desa diharapkan masyarakat desa-desa di Pemulutan menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera dari sebelum ada Bumdes. Hasil keuntungan Bumdes diharapkan dapat meningkatkan PADes. PADes ini diharapkan dapat menambah pendapatan desa untuk kepentingan perekonomian dan pembangunan desa.

Berdasarkan jawaban responden di lapangan, hasil dari usaha Bumdes masa pandemi ini tidak berkontribusi terhadap PADes.

Penguatan Bumdes untuk meningkatkan PADes yang berkontribusi dari kepemimpinan aparatur Bumdesnya. Gaya kepemimpinan rerata direktur/ketua Bumdes mampu mengayomi bawahan meskipun tidak menghasilkan dalam bentuk nilai ekonomis. Di saat pandemi ini pengelolaan dana desa yang semula dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan Bumdes sulit diandalkan. Tidak dapat dipungkiri, Bumdes-Bumdes di kecamatan Pemulutan yang terkatagori pada tahap bertumbuh mengalami kekurangan dana. Selama ini, pendapatan transfer di pemerintah desa merupakan komponen terbesar yang diperoleh desa guna melaksanakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, seperti pembuatan jalan/jembatan.

Dana yang diperoleh dari PADes digunakan untuk pembangunan yang bersifat jangka pendek dan menengah, antara lain: perbaikan balai desa, kantor Bumdes, dan prasarana umum seperti kamar mandi umum, mushola. Kondisi pandemi saat ini desa tidak dapat bergantung sepenuhnya dari dana pemerintah. Disisi lain, peran Bumdes yang seharusnya meningkatkan PADes pun berbanding terbalik.

Unsur penguatan Bumdes yang terdiri dari partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes dan gaya kepemimpinan di Bumdes-Bumdes pada kecamatan Pemulutan Ogan Ilir memberikan kontribusi sebesar 20,8% terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Unsur-unsur penguatan Bumdes ini secara parsial hanya pada gaya kepemimpinan saja yang berkontribusi terhadap PADes sedangkan dua unsur lainnya tidak memberikan kontribusi.

Pengujian hipotesis pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur/pengelola Bumdes dan gaya kepemimpinan terhadap pendapatan asli desa dengan memperhatikan koefisien regresi (β) tiap variabel $\neq 0$, maka hipotesis diterima. Hasil pengujian regresi menggunakan SPSS ditampilkan dalam tabel 18.

Tabel 18. Hasil Uji Regresi

	Variabel	Koefisien Regresi (β)	R	Adjusted R ²
	Konstanta	16.140	.488 ^a	.208
X ₁	Partisipasi Masyarakat (PM)	.122		
X ₂	Kompetensi Pengelola Bumdes (KPB)	.018		
X ₃	Gaya Kepemimpinan (GK)	.242		

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 18, hasil pengujian partisipasi masyarakat (X_1), kompetensi pengelola Bumdes (X_2), dan gaya kepemimpinan (X_3) terhadap Pendapatan Asli Desa atau PADes (Y) diperoleh $\beta_1 = 0,122$, $\beta_2 = 0,018$, $\beta_3 = 0,242$. Kriterianya, jika paling sedikit ada β_i ($i = 1, 2, 3$) $\neq 0$, X_1 , X_2 , X_3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y . Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa. Nilai R sebesar 0,488 menunjukkan hubungan partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes, dan gaya kepemimpinan terhadap pendapatan asli desa. *Adjusted R² Square* dengan nilai 0.208 artinya, pendapatan asli desa dipengaruhi partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola Bumdes, dan gaya kepemimpinan sebesar 20,8%, dan 79,2% dipengaruhi unsur-unsur lain diluar penelitian ini.

8.5 KESIMPULAN

Penguatan perekonomian desa melalui kontribusi Bumdes diharapkan akan lebih berdayaguna. Ketidakstabilan kondisi perekonomian desa saat pandemi menjadi perekat bagi pengelola Bumdes-Bumdes di kecamatan Pemulutan untuk berbenah diri. Dibutuhkan partisipasi warga desa, kompetensi para pengelola Bumdes dan pemimpin yang handal dalam mengelola Bumdes. Ketersediaan anggaran desa yang mencukupi akan menjadi penopang dari dana anggaran tersebut untuk meningkatkan permodalan Bumdes. Jika hal ini terwujud, diharapkan akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pada gilirannya nanti dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Bumdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga dibutuhkan pengelola Bumdes yang berkompeten.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan program Bumdes dan kurangnya pengetahuan sehubungan dengan pembuatan rencana kerja dan pelaporan keuangan Bumdes akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang tidak akuntabel. Pengelolaan keuangan yang kurang baik menjadikan salah satu penyebab Bumdes tidak mampu meningkatkan PADes.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, A. and Sukoco, A. (2017) 'The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture. *Jurnal Lentera*.' *Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(2).
- Atmadja, A., Saputra, K. and Koswara, M. (2018) 'The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management.' *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Cohen, J. M. and Uphoff, N. T. (1977) *Rural Development Participation ; Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University Press.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furqon, Mp. G. K. terhadap K. M. pada B. D. R. S. ohamma. A. and Qudbi, M. A. (2018) 'Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Masyarakat pada Bumdes Desa Rombasan Sumenep.' *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Madura. Madura.*, 3(1).
- Gordon (1988) *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- June, S. and Mahmood, R. (2011) 'The Relationship Between Role Ambiguity, Competency and Person-Job Fit With the Job Performance of Employees in the Service Sector SMEs in Malaysia.' *Business Management Dynamics*, 1(2).
- Mulyadi, M. (2019) *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Nisa, S. K. (2018) 'Pengaruh Tingkat Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Tingkat Kinerja Organisasi Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Bumdes Maju Makmur Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).' *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga.*, 6(3).
- Northouse, P. G. (2013) *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Edisi 6. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.

- (2017). Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Prastowo, A. (2020) *Ada desa fiktif, penyaluran Dana Desa diperketat*, Lokadata. Available at: <https://lokadata.id/artikel/ada-desa-fiktif-peny-aluran-dana-desa-diperketat> (Accessed: 30 June 2020).
- Pratiwi, E., Sujana, I. N. and Haris, I. A. (2019) 'Persepsi dan Parisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja Bumdes Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1).
- Rivai, V. and Mulyadi, D. (2011) *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, K. A. K. et al. (2019) 'Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan', *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), pp. 5–13.
- Sedarmayanti (2018) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soleman, K. and Latuconsina, Y. M. (2019) 'Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Desa dan Pemanfaatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Buru yang Dimoderasi dengan Peran Pendamping Profesional', *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 8(2).
- Spencer and Spencer (1993) *Competence at Work*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sudarmanto (2014) *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan*

- Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sutrisno, E. (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2010) *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka.
- Tim Orator (2019) *Minim BUMDes Kategori Maju di Sumsel*, Orator.
id. Available at: <https://orator.id/2019/11/22/minim-bumdes-kategori-maju-di-sumsel/> (Accessed: 20 June 2020).
- Yamin, M. and Maisah (2010) *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Persada Press.
- Zamroni (2011) *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

RIWAYAT HIDUP

Maria

adalah staf pengajar pada program D3 akuntansi dan D4 akuntansi sektor publik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Lahir di Sungailiat (Bangka), 18 November 1966. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya (1993), gelar Magister Sains bidang kajian akuntansi dari Universitas Padjadjaran (2006), dan Doktor dari Universitas UPI Y.A.I (2017) untuk konsentrasi akuntansi manajemen.



Rosy Armaini

Lahir di Palembang, 24 Agustus 1971, staf pengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya program D3 akuntansi dan D4 akuntansi sektor publik. Memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya jurusan akuntansi tahun 1995. Master pada tahun 2001 untuk kajian akuntansi dari Universitas Padjadjaran.

